

**PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP  
KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN  
(Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY)**

**Lily Lovita  
Rustiana**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,  
Jl. Babarsari 43-44, Yogyakarta.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh dari skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Data penelitian menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner pada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY dengan sampel 31 orang. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi linier sederhana.

Terdapat empat kasus riil yang digunakan untuk mengukur kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada akun pendapatan dan aset tetap. Hasil analisis pada 3 kasus *red flags* menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hasil lainnya menyebutkan skeptisisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hal ini terjadi karena permasalahan bukti kepemilikan aset sudah menjadi masalah yang berulang dan tidak kunjung diselesaikan. Berdasarkan penilaian, kemungkinan kecil jika disebabkan *fraud*, namun lebih pada masalah administrasi dan koordinasi antar institusi yang perlu diperbaiki. Sedangkan untuk akun pendapatan kemungkinan disebabkan adanya bias karena tidak terjun langsung sebagai auditor, keterbatasan waktu pemeriksaan lapangan dan auditor beranggapan bahwa masih ada pemeriksaan lanjutan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu).

**Kata kunci: *Fraud*, Skeptisisme Profesional Auditor, Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan, Auditor BPK, Pemeriksaan Keuangan Negara**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar belakang**

Skeptisisme profesional merupakan hal yang mendasar dalam audit. Menurut Tuanakotta (2010: 106) terdapat tiga sikap dan tindak-pikir yang selalu harus melekat pada diri seorang auditor, yakni independen, obyektif dan skeptis. Seorang auditor pada tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan mencari informasi lebih banyak dibandingkan auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang rendah. Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuanakotta, 2011: 77).

Indikasi kecurangan dapat ditemukan jika skeptisisme profesional dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan setiap tugas auditnya. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007). Tanpa menerapkan skeptisisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan akan disembunyikan oleh pelakunya (Noviyanti, 2008).

Survei *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* pada tahun 2016 menunjukkan bahwa penyelewengan aset (*asset misappropriation*) adalah kasus yang paling umum terjadi pada *occupational fraud* yaitu lebih dari 83% tetapi menyebabkan kerugian rata-rata paling kecil yaitu sebesar \$125.000. Kasus korupsi (*corruption*) terjadi 35,4% dengan kerugian rata-rata sebesar \$200.000. Terakhir, kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) terjadi kurang dari 10% tetapi kasus tersebut memiliki dampak keuangan yang paling besar yaitu kerugian rata-rata sebesar \$975.000.

Penelitian dari Beasley *et al.* (2001) dalam Noviyanti (2008) menyimpulkan dari 45 kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan skeptisisme profesional yang memadai dan ini merupakan urutan ketiga dari audit defisiensi yang paling sering terjadi. Fullerton dan Durtschi (2004) yang meneliti tentang pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor internal di Florida menunjukkan bahwa auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi akan melaporkan informasi yang lebih banyak dan signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang rendah.

Penelitian serupa diperoleh dari Pramudyastuti (2014) yang meneliti tentang pengaruh skeptisisme profesional auditor, independensi dan pelatihan audit terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Sleman menunjukkan hasil skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, Hilmi (2011) dan Wiguna (2014) yang meneliti auditor independen pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta dan Malang juga menunjukkan bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan isu yang peneliti temukan, maka peneliti menyadari pentingnya skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Peneliti mengambil sampel pada auditor independen pemerintah yaitu auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan BPK memegang peranan penting dalam mencegah dan melaporkan kecurangan keuangan negara. BPK RI dipercaya oleh dunia internasional dengan ditunjuk sebagai ketua *INTOSAI Working Group Environmental Audititng (WGEA)* dan *External Auditor* Badan Tenaga Atom Dunia atau dikenal *International Atomic*

*Energy Agency (IAEA)* periode 2016-2017. Penelitian tentang skeptisisme profesional banyak dilakukan pada auditor internal dan eksternal, tetapi jarang pada auditor eksternal pemerintah. Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh dari skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

## **II. Landasan Teori dan Pembentukan Hipotesis**

### **A. Audit Sektor Publik**

Istilah audit sektor publik sering kali dikenal dengan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 butir 1 UU No 15 Tahun 2004). Pemeriksaan dalam sektor keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik yang berfungsi sebagai auditor eksternal dan seringkali disebut sebagai “pemeriksa”. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang memberlakukan juga Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta tujuan dan harapan penugasan. Selain itu, proses pemeriksaan berpedoman juga pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Berdasarkan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara terdapat tiga jenis pemeriksaan keuangan negara, yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi (*examination*), revidu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

meliputi antara lain: pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

### **B. Kecurangan/Fraud**

Hal mendasar yang membedakan antara *fraud* dan *error* adalah hasil dari salah saji laporan keuangan disengaja atau tidak disengaja. (Bunget dan Dumitrescu, 2009). *Fraud* mengindikasikan bahwa salah saji dalam laporan keuangan disengaja, sedangkan *error* tidak disengaja. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree* yang memiliki tiga cabang utama, yaitu:

#### 1. *Corruption*

Digambarkan dengan empat bentuk yaitu benturan kepentingan (*conflicts of interest*), penyuapan (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

#### 2. *Asset Misappropriation*

*Asset misappropriation* dalam bentuk penjarahan kas dilakukan dalam tiga bentuk: *theft of cash on hand*, *theft of cash receipts*, dan *fraudulent disbursements*. Sedangkan penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *misuse* dan *larceny*.

#### 3. *Financial Statements Fraud*

Dalam laporan keuangan, *fraud* ini berupa salah saji (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatement*).

### **C. Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan**

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 memuat persyaratan kemampuan/keahlian yaitu pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) merupakan kesanggupan seorang auditor dalam menemukan atau menentukan tindakan ilegal yang mengakibatkan salah saji material dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja (Widiastuti dan Pamudji, 2009).

Pernyataan standar pelaksanaan tambahan ketiga dalam merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*) adalah: (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007: 39)

1. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan
2. Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan

perundang-undangan atau ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau kedua-duanya. Pemeriksa juga harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko tersebut untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi.

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan salah satu cara menemukan kecurangan adalah dengan mengidentifikasi suatu gejala atau *red flags* yang dapat menimbulkan kecurigaan akan kecurangan. *Red flags* adalah kumpulan keadaan yang bersifat tidak biasa atau berbeda dari aktivitas normal, yang merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut (DiNapoli, 2008).

Anggriawan (2014) menyebutkan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu skeptisisme profesional. Semakin skeptis seorang auditor maka auditor akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dengan cara mencari bukti atau informasi tambahan untuk mendukung kesimpulannya.

#### **D. Skeptisisme Profesional Auditor**

Berdasarkan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, obyektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesionalnya terhadap setiap aspek pekerjaannya. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan.

Hurt (2010) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai karakteristik individu yang multidimensional dengan adanya sikap yang selalu mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis. Sebagai karakteristik yang individual, skeptisisme profesional dapat berbentuk sifat (yang relatif stabil, aspek yang tahan lama dalam diri individu) dan juga menyatakan keadaan sementara yang dipengaruhi oleh variabel situasional. Terdapat enam karakteristik yang terkandung dalam skeptisisme profesional yaitu:

1. **Pikiran yang mempertanyakan (*questioning mind*)**  
Skeptisisme profesional membutuhkan pertanyaan yang berkelanjutan apakah informasi dan bukti yang diperoleh menunjukkan bahwa salah saji material karena kecurangan telah terjadi.
2. **Penundaan keputusan (*suspension of judgement*)**  
Menahan keputusan sampai mendapatkan bukti yang cukup memadai yang menjadi dasar pembuatan kesimpulan.
3. **Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*)**  
Berbeda dengan karakteristik *questioning mind* yang bertanya-tanya karena keraguan, pencarian pengetahuan lebih dari rasa pengetahuan umum atau kepentingan.
4. **Pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*)**

Aspek penting dari mengevaluasi bukti audit adalah pemahaman interpersonal, yang berkaitan dengan memahami motivasi dan integritas individu yang memberikan bukti.

5. Keteguhan hati (*Autonomy*)

Ketika auditor memutuskan tingkat bukti yang diperlukan untuk menerima hipotesa tertentu. Skeptisisme auditor berkaitan dengan keteguhan akan kebenaran klaim dan kurang dipengaruhi keyakinan atau upaya persuasif orang lain.

6. Keyakinan diri (*self-esteem*)

Keyakinan diri memungkinkan auditor untuk menolak upaya persuasi dan menentang asumsi atau kesimpulan orang lain

Tiga karakteristik pertama (*questioning mind, suspension of judgement, search for knowledge*) menunjukkan cara auditor memeriksa bukti sebelum membuat keputusan. Pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) mengidentifikasi kebutuhan audit ketika mengevaluasi bukti. Dua karakteristik terakhir (*self-esteem dan autonomy*) membahas kemampuan individu untuk bertindak atas informasi yang diperoleh.

### E. Hipotesis

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 mensyaratkan pemeriksa untuk melaksanakan kemahiran profesional yang menuntut pemeriksa untuk menerapkan skeptisisme profesional. Dengan menerapkan kemahiran profesional secara cermat dan seksama memungkinkan pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Menurut Fullerton dan Durtschi (2004) auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi akan melaporkan informasi yang lebih banyak dan signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisisme yang rendah. Hal ini didukung dengan penelitian dari Hilmi (2011) dan Wiguna (2014) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

### III. Metodologi Penelitian

#### A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### B. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan sampel data menggunakan teknik survei. Pendistribusian kuesioner diberikan secara langsung kepada BPK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuesioner dalam penelitian ini memuat dua bagian yaitu:

1. Data responden yang memuat karakteristik demografi responden seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman sebagai auditor, dan sebagainya.

2. Kuesioner mengenai skeptisisme profesional auditor yang memuat 30 pernyataan dan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan yang memuat 8 pernyataan.

### C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

#### 1. Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional sebagai karakteristik individu yang multidimensional dengan adanya sikap yang selalu mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis (Hurtt, 2010). Kuesioner yang digunakan diadopsi dari Hurtt (2010) dengan 6 elemen yaitu *search for knowledge*, *suspension of judgment*, *self-determining*, *interpersonal understanding*, *self-confidence*, dan *questioning mind*. Pengukuran dilakukan dengan *Hurtt Skepticism Scale* dengan skala interval menggunakan skala likert 1-5. Pengukuran variabel skeptisisme profesional auditor menggunakan *Hurtt Skepticism Scale* yang dikembangkan Hurtt (2010) dengan 30 pernyataan. Pada pernyataan 1, 10, 11, 16, 17, 19, 25, 26 menggunakan *reverse scored* (skala interval dari angka 5 ke 1). Angka yang dibalik tersebut yang akan digunakan untuk analisis data.

#### 2. Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) merupakan kesanggupan seorang auditor dalam menemukan atau menentukan tindakan ilegal yang mengakibatkan salah saji material dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja (Widiastuti dan Pamudji, 2009). Kuesioner yang digunakan diadopsi dari Pramudyastuti (2014) dengan menggunakan kasus riil yang terjadi di pemerintah daerah. Terdapat empat kasus riil yang digunakan untuk mengukur kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kasus tersebut peneliti ambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014. Peneliti mengambil kasus-kasus tersebut karena Kabupaten Gunung Kidul lima tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dengan adanya opini tersebut, adanya kemungkinan indikasi *fraud* atau peluang salah saji material yang diidentifikasi. Elemen kemampuan auditor mendeteksi kecurangan adalah mengidentifikasi indikasi *fraud* (*red flags*), menentukan peluang risiko/ salah saji material yang diidentifikasi. Pengukuran menggunakan Skala interval menggunakan skala likert 1-5.

### IV. Analisis Data dan Pembahasan

#### A. Analisis Regresi Sederhana dan Pembahasan

##### 1. *Red Flags* pada Aset Tetap

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Sederhana *Red Flags* pada Aset Tetap (F1)**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.683	3.121		2.141	.041
	SP	.011	.047	.044	.237	.815

a. Dependent Variable: F1

Sumber: Olahan data (2016), lampiran

Kasus F1 untuk mengukur kemampuan auditor mendeteksi kecurangan:

“Dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap, Kabupaten X. belum dapat merinci sebagian besar mutasi penambahan dan pengurangan tahun 2014. Perolehan tanah untuk perluasan jalan hanya berdasarkan surat pernyataan kerelaan dari warga pemilik tanah, terdapat 32 sertifikat asli aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, 217 bidang aset tetap tanah belum bersertifikat, DPU tidak membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) secara lengkap dan terdapat selisih pencatatan nilai aset tetap antara KIB dengan nilai yang tercantum dalam neraca, beberapa aset tetap yang tercantum dalam KIB Dinas Kesehatan tidak diketahui keberadaannya”.

Mayoritas auditor menjawab “sedang” pada pernyataan adanya indikasi fraud dan “tinggi” pada pernyataan risiko/ peluang salah saji material. Dalam hal ini, tidak adanya bukti kepemilikan aset seharusnya akan semakin meningkatkan skeptisisme profesional auditor untuk menelusuri lebih lanjut terkait “*right and obligation*” atas aset tersebut atau eksistensi dari bukti kepemilikan tersebut.

Hasil penelitian yang menyebutkan tidak adanya pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, kemungkinan disebabkan permasalahan bukti kepemilikan aset di Kabupaten X sudah menjadi masalah yang berulang dan tidak kunjung diselesaikan. Berdasarkan penilaian, kemungkinan kecil jika disebabkan fraud, namun lebih pada masalah administrasi dan koordinasi antar institusi yang perlu diperbaiki.

## 2. *Red Flags* pada Pendapatan (F2)

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Sederhana *Red Flags* pada Pendapatan (F2)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.467	1.559		4.150	.000
	SP	-.010	.023	-.083	-.446	.659

a. Dependent Variable: F2

Sumber: Olahan data (2016), lampiran

Kasus F2 untuk mengukur kemampuan auditor mendeteksi kecurangan: “Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp. 5.115.339.964,00 yang dicatat dalam jumlah netto tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp. 5.115.339.964,00 disajikan dalam jumlah netto, yaitu sebesar nilai realisasi yang disetorkan oleh PT. A ke Kas Daerah setelah dipotong dengan biaya pungut. Berdasarkan perhitungan PT. A pendapatan pajak penerangan jalan bruto adalah sebesar Rp 5.802.443.478,00.”

Dalam pemeriksaan keuangan, BPK wajib memperoleh keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji (*misstatement*) yang material. Pemeriksa memastikan adanya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), keandalan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (Tuanakotta, 2015: 636). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi pendapatan-LO

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini karena penemuan kemudian salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang ada dalam laporan keuangan, tidak berarti bahwa dengan sendirinya merupakan bukti kegagalan untuk mematuhi standar *auditing* yang ditetapkan (Murwanto dkk, 2010).

### 3. *Red Flags* pada Aset Tetap (F3)

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Sederhana *Red Flags* pada Aset Tetap (F3)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.216	2.531		4.826	.000
	SP	-.087	.038	-.392	-2.297	.029

a. Dependent Variable: F3

Sumber: Olahan data (2016), lampiran

Kasus F3 untuk mengukur kemampuan auditor mendeteksi kecurangan: “Pemerintah Kabupaten X. tidak melaksanakan pencatatan dan penyajian Aset Tetap secara memadai, yaitu temuan terkait penyajian aset tetap bernilai Rp0,00 dan Rp1,00, aset tetap yang disajikan dalam KIB B dan KIB E yang tidak didukung dengan rincian, aset tetap yang belum dicatat dalam KIB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, penyajian aset tetap dalam kondisi rusak berat, aset yang dihibahkan dan masih tercatat dalam KIB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.”

Hasil penelitian menunjukkan skeptisisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam kasus ini, aspek *questioning mind* memiliki pengaruh signifikan namun permasalahan aset tetap sudah menjadi masalah yang berulang. Ada kemungkinan juga disebabkan adanya keterbatasan waktu pemeriksaan lapangan pada saat pemeriksaan laporan keuangan. Auditor dalam hal ini beranggapan bahwa ada pemeriksaan lanjutan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) masih dimungkinkan jika indikasi *fraud* tersebut memenuhi unsur tipikor. Hal ini menyebabkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menurun karena auditor lebih memprioritaskan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan SAP dan kecukupan pengungkapannya.

### 4. *Red Flags* pada Pendapatan (F4)

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Sederhana *Red Flags* pada Pendapatan (F4)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.670	1.524		4.376	.000
	SP	-.005	.023	-.042	-.229	.821

a. Dependent Variable: F4

Sumber: Olahan data (2016), lampiran

Kasus F4 untuk mengukur kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan : “Pemerintah Kabupaten X. belum mengakui penerimaan kas dari klaim Askes PNS pada Dinas Kesehatan dan Jamkesmas masing-masing Rp.832.922.700,00 dan Rp.130.963.176,00. Penerimaan tersebut digunakan langsung untuk kegiatan penerimaan Askes PNS dan Jamkesmas. Jika Pemerintah X mengakui pendapatan tersebut maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah besar Rp.936.885.876,00 sesuai jenis pendapatannya”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP no 71 Tahun 2010, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Dalam kasus ini, penerimaan pendapatan digunakan langsung sehingga aset tidak diakui. Namun, disebutkan jika Pemerintah X mengakui pendapatan tersebut maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah besar Rp.963.885.876,00. Pada kasus ini, peneliti mengubah angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya Rp.963.885.876,00 menjadi Rp.936.885.876,00. Hasil penelitian menunjukkan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Kemungkinan disebabkan adanya bias karena tidak terjun langsung sebagai auditor Laporan Keuangan Pemda Gunungkidul sehingga para responden kurang cermat dalam mengisi.

## B. Pembahasan Tiap Aspek Skeptisisme Profesional

Tabel 6

Hasil Analisis Regresi Berganda Tiap Aspek Skeptisisme Profesional

Elemen Skeptisisme Profesional	F1	F2	F3	F4
SK	0,456	0,152	0,858	0,297
SJ	0,028**	0,630	0,944	0,954
SD	0,000***	0,035**	0,075*	0,019**
IU	0,000***	0,147	0,128	0,186
SC	0,120	0,290	0,144	0,784
QM	0,000***	0,967	0,016**	0,862
Total	0,604	2,221	2,165	3.102

Sumber: Olahan data (2016), lampiran

Keterangan:

\*\*\* = signifikansi < 0,01 (1%)

\*\* = signifikansi < 0,05 (5%)

\* = signifikansi < 0,10 (10%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tiap aspek skeptisisme profesional memiliki pengaruh yang berbeda-beda sesuai dengan kasus *fraud*

masing-masing. Untuk *red flags* pada aset tetap (variabel F1), aspek *self-determining*, *interpersonal understanding*, *questioning mind* signifikan pada  $\alpha=0,01$  atau memiliki tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan aspek *suspension of judgement* signifikan pada  $\alpha=0,05$  atau memiliki tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini, aspek *self-determining*, *interpersonal understanding*, *questioning mind* memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan aspek lainnya. Auditor memiliki kemampuan pemahaman sumber diperolehnya bukti audit, pola pikir yang selalu bertanya-tanya dalam pengumpulan bukti dan determinasi diri dalam mengolah bukti yang diperoleh.

Untuk *red flags* pada pendapatan (variabel F2), hanya aspek *self-determining* yang signifikan pada  $\alpha=0,05$  atau memiliki tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan aspek skeptisisme profesional lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa aspek *self-determining* saja yang memiliki pengaruh paling kuat pada variabel F2. Pada kasus ini auditor memiliki sikap determinasi diri yang baik dalam mengolah bukti audit yang diperoleh.

Untuk *red flags* aset tetap (variabel F3), aspek *questioning mind* signifikan pada  $\alpha=0,05$  atau memiliki tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan aspek *self-determining* signifikan pada  $\alpha=0,10$  atau memiliki tingkat kepercayaan 90%. Dapat disimpulkan bahwa aspek *questioning mind* pengaruhnya lebih kuat dibanding aspek *self-determining* pada variabel F3. Sedangkan aspek skeptisisme profesional lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pada kasus pencatatan aset tidak memadai, auditor memiliki sikap yang selalu bertanya-tanya dalam pengumpulan bukti audit dan juga determinasi diri untuk mengolah bukti tersebut.

Untuk *red flags* pada pendapatan (variabel F4), hanya aspek *self-determining* saja yang signifikan pada  $\alpha=0,05$  atau memiliki tingkat kepercayaan 95%. Dalam kasus ini, auditor memiliki aspek determinasi diri namun aspek skeptisisme profesional lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Secara garis besar dari empat kasus *red flags* yang digunakan untuk mengukur kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, hanya kasus pada variabel F1 yang memiliki pengaruh paling banyak terhadap aspek skeptisisme profesional auditor. Hal ini sesuai dengan statistik deskriptif yang menunjukkan kemampuan auditor dalam mendeksi kecurangan pada aspek F1 termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan jika dilihat dari aspek skeptisisme profesional yang signifikan, aspek *self-determining* selalu mempengaruhi variabel *fraud* (F1-F4) pada tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Hal ini berarti determinasi diri dalam mengolah bukti audit dimiliki auditor pada setiap kasus. Aspek *suspension of judgement* dalam skeptisisme profesional juga termasuk dalam kategori tinggi, namun hanya berpengaruh terhadap kasus *red flags* pada aset tetap (F1).

## V. Penutup

### A. Simpulan

Terdapat empat kasus yang digunakan untuk melihat pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Dari hasil analisis dan pembahasan data yang diperoleh dari responden, simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Variabel kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada kasus *red flags* pada aset tetap (F1) dan *red flags* pada pendapatan (F2 dan F4) tidak signifikan dengan variabel skeptisisme profesional auditor.
2. Pada kasus *red flags* pencatatan aset tidak memadai (F3), skeptisisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ( $p\text{-value}=0,029$ ).
3. Dari empat kasus *red flags* yang digunakan untuk mengukur kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, aspek skeptisisme profesional auditor pada *red flags* pada aset tetap (F1) memiliki tingkat signifikansi paling banyak. Hal ini terjadi pada dimensi *suspension of judgment*, *self-determination*, *interpersonal understanding* dan *questioning mind*.
4. Dilihat dari aspek skeptisisme profesional yang signifikan, aspek *self-determining* selalu mempengaruhi variabel kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (F1-F4) pada tingkat signifikansi yang berbeda-beda.

### **B. Implikasi Penelitian**

Aspek skeptisisme profesional auditor yang muncul pada kasus *red flags* pada aset tetap (F1) memiliki tingkat signifikansi paling banyak. Dalam upaya meningkatkan skeptisisme profesional, auditor dapat melatih pada kasus *red flags* aset tetap (F1). Hal ini dilakukan agar auditor memiliki kemampuan pemahaman sumber diperolehnya bukti audit, pola pikir yang selalu bertanya-tanya dalam pengumpulan bukti dan determinasi diri dalam mengolah bukti yang diperoleh. Selanjutnya auditor dapat melatih pada kasus pencatatan aset tidak memadai (F3) dan *red flags* pada pendapatan (F2 dan F4).

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kekurangan karena keterbatasan waktu dan biaya, diantaranya:

1. Responden penelitian ini hanya auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak dapat mengeneralisasi hasil penelitian.
2. Tidak membedakan antara auditor senior dan auditor junior sehingga ada dugaan bias responden.
3. Tidak adanya interaksi langsung dengan responden sehingga tidak bisa memberi penjelasan yang lengkap terkait substansi kuesioner.
4. Kuesioner untuk variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan masih belum lengkap.
5. Kuesioner disebarkan saat auditor BPK sibuk melaksanakan pemeriksaan.
6. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner menyebabkan data yang dihasilkan bias, dan ada beberapa butir pernyataan skeptisisme profesional auditor yang dibuang karena nilai  $MSA < 0,5$ .
7. Pada kasus *red flags* pada pendapatan (F4), peneliti mengubah angka untuk melihat kecermatan auditor namun ternyata auditor tidak cermat dalam pengisian kuesioner.

### **D. Saran**

Menyadari keterbatasan penelitian ini, untuk penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas jangkauan responden sehingga dapat

menggeneralisasi hasil penelitian. Selain itu, sebaiknya penelitian selanjutnya tidak melibatkan auditor junior sebagai responden. Penggunaan kuesioner untuk variabel kemampuan auditor mendeteksi kecurangan juga dapat dibuat lebih detail sehingga skeptisisme profesional auditor dapat terukur dengan baik. Jika peneliti ingin memodifikasi kuesioner, harap mempertimbangkan situasi audit yang dihadapi auditor. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara agar dapat menyaring responden sesuai yang dibutuhkan dan peneliti dapat mengurangi kemungkinan jawaban yang bias.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). *Report To The Nation On Occupational Fraud and Abuse*. Global Fraud Study
- Agung Rai, I Gusti. (2010). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Anggriawan E.F. (2014). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DIY)*. Jurnal Nomina/ Volume III Nomor 2/ Tahun 2014
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N. dan Kell, Wallter G. (2002). *Modern Auditing* (Seventh Edition). USA: John Wiley & Sons, Inc.
- BPK. (2015). *Menjadi Auditor Eksternal IAEA, Kapasitas Audit BPK Diuji*. Diakses dari <http://www.bpk.go.id/news/menjadi-auditor-eksternal-iaea-kapasitas-audit-bpk-diuji>
- BPK. (2015). *Pendapat BPK*. [http://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2015/otherpub\\_2015\\_143573\\_9026.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2015/otherpub_2015_143573_9026.pdf). Diakses tanggal 9 April 2016.
- Bastian, Indra. (2011). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Bunget dan Dumitrescu. (2009). *Detecting and Reporting the Frauds and Errors by the Auditor*. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(1)
- Chen, Qiu, Khim Kelly, dan Steven E. Salterio. (2009). *Do Audit Actions Consistent with Increased Auditor Scepticism Deter Potential Management Malfeasance?*. Queen's University Kingston
- Davia, H.R., Patrick C. Coggins, John C. Wideman, dan Joseph T. Kastantin (2000). *Accountant's Guide to Fraud Detection and Control*. John Wiley and Sons, Inc.
- Djohar, Randy Adisaputra. (2012). *Faktor- Faktor yang Berkontribusi Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor*. S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- DiNapoli, Thomas P. (2008). *Red Flags for Fraud*. State of New York Office of the State Comptroller.
- Elder, R.J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf. (2012). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia) Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fullerton dan Durtschi. (2004). *The Effect of Professional Skepticism on the Fraud Detection Skills of Internal Auditors*. Utah State University 83
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. (2013) . *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Hilmi, Fakhri. (2011). *Pengaruh Pengalaman, Pelatihan, dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hurtt, R. Kathy. (2010). *Development of a Scale to Measure Professional Skepticism*. Auditing: A Journal of Practice and Theory. American Auditing Association.
- Kahar. *Penyusutan Aset Tetap Pemerintah dan Permasalahannya*. <http://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1908/Penyusutan-Aset-Tetap-Pemerintah-dan-Permasalahannya.bpkp>. Diakses tanggal 9 April 2016
- Koroy, Tri Ramaraya. (2008). *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal*. Jurnal akuntansi dan keuangan, vol. 10, no. 1, mei 2008: 22-33
- Messier, Jr., William F., Glover, Steven M., dan Prawitt, Douglas F. (2008). *Jasa Audit & Assurance: Pendekatan Sistematis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murwanto, Rahmadi, Adi Budiarto dan Fajar Hasri Ramadhana. (2010). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Pemerintah*. LPKPAP-BPPK
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Noviyanti, Suzy. (2008). *Skeptisme Profesional Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 5, No. 1, hal. 102-125
- Pramudyastuti, Octavia Lhaksmi. (2014). *Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pelatihan Audit Kecurangan, dan Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan*. S2 Thesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

- Quadrakers, Lucas Mathias. (2009). *A Study of Auditors' Skeptical Characteristics and Their Relationship to Skeptical Judgments and Decisions*. Vrije Universiteit Amsterdam
- Sisilia. (2011). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sukamto, Imam. (2015). *Hasil Pemeriksaan Semester I, BPK Temukan 15.434 Masalah*. <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/05/087706662/hasil-pemeriksaan-semester-i-bpk-temukan-15-434-masalah>. Diakses tanggal 21 November 2015.
- Tuanakotta, T.M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T.M. (2011). *Berpikir Kritis Dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T.M. (2014). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T.M. (2015). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiyastuti dan Pamudji. (2009). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Wiguna, Floreta. (2014). *Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Survei pada Auditor KAP di Malang)*. Universitas Telkom
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 04/K/I-III.2/5/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan. Diakses 6 Desember 2015.
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/K/I-XIII.2/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan. Diakses 7 April 2016.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses 19 Oktober 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses tanggal 14 Desember 2015.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Diakses tanggal 29 Mei 2015.